

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 1990
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISKAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, BESERTA
PROTOCOLNYA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di Singapura, pada tanggal 8 Mei 1990 Delegasi Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, beserta Protocol, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Republik Indonesia dan Republik Singapura;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a di atas dengan Keputusan Presiden.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISKAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, BESERTA PROTOCOLNYA

Pasal 1

Mengesahkan Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to taxes on Income, beserta Protocol, yang telah ditandatangani di Singapura, pada tanggal 8 Mei 1990, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Republik Indonesia dan Republik Singapura yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 Desember 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 Desember 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MORDIONO